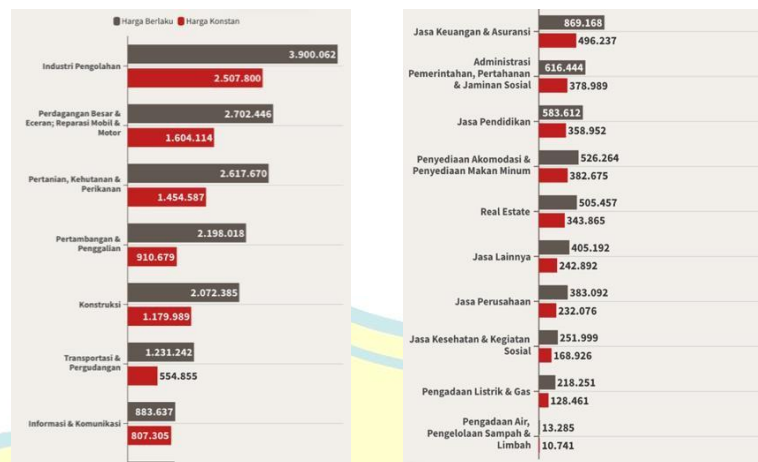


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor industri manufaktur memiliki posisi strategis sebagai pilar fundamental dalam sistem ekonomi domestik, mengingat kapasitasnya dalam menciptakan nilai tambah yang substansial serta memberikan stimulasi ekonomi bagi bidang usaha lain melalui dampak ekonomi berantai. Selain berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan, industri pengolahan juga menjadi tumpuan utama dalam mendistribusikan lapangan kerja formal bagi para pekerja ahli, yang secara tidak langsung menjamin kepastian upah serta jaminan sosial yang lebih baik ketimbang sektor non-formal. (Kambono et al., 2024) mengutip pandangan Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa dalam skema transformasi ekonomi, manufaktur harus diposisikan sebagai prioritas utama karena perannya sebagai *leading sector* atau penggerak bagi sektor lainnya. Sebagai sektor pemimpin, industri manufaktur memiliki kapabilitas untuk memicu ekspansi ekonomi melalui integrasi rantai pasokan bahan baku dan hasil produksi, dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan sumbangsih besar terhadap pendapatan nasional. Merujuk pada statistik Badan Pusat Statistik tahun 2023, sektor ini menduduki peringkat tertinggi dalam struktur ekonomi nasional, baik ditinjau dari harga berlaku maupun harga konstan.



Gambar 1. 1 PDB Harga Berlaku & Konstan Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar), 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik

Namun, stabilitas ekonomi nasional saat ini tengah teruji oleh gejala deindustrialisasi dini, di mana peranan manufaktur dalam struktur Produk Domestik Bruto menyusut padahal kesejahteraan masyarakat belum mencapai titik optimal. Menurut Jalilian & Weiss (2000) dalam (L. N. I. Sari & Wulansari, 2022) hal tersebut dikarenakan adanya deindustrialias. Fenomena ini ditandai oleh merosotnya pangsa sektor pengolahan dalam ekonomi makro serta berkurangnya persentase keterlibatan tenaga kerja di bidang industri. Problematika krusial muncul ketika arah perkembangan industri bergeser terlalu cepat ke arah sektor padat modal yang intensif atau sektor jasa sebelum basis manufaktur nasional menguat. Meski mekanisasi dan teknologi meningkatkan efektivitas kerja, daya tampung industri terhadap pekerja yang tidak memiliki keahlian

khusus justru menyempit. Hal ini mengakibatkan gelombang tenaga kerja yang seharusnya bekerja di sektor produksi terpaksa beralih ke pekerjaan informal yang minim jaminan serta produktivitasnya relatif rendah.

Di wilayah yang sedang berkembang seperti Indonesia, metode produksi berbasis tenaga kerja manusia (padat karya) biasanya menjadi opsi yang paling ideal karena ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Kontras dengan hal tersebut, negara-negara maju yang sudah mapan industrinya cenderung mengadopsi teknik padat modal karena ketersediaan kapital yang besar dan tingginya biaya upah pekerja (Djunaidi & Alfitri, 2022). Sebagai bagian dari upaya mengejar status negara maju, Indonesia secara konsisten berupaya memacu pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan taraf hidup yang memadai bagi seluruh rakyatnya. Meski begitu, isu ketenagakerjaan masih dibayangi oleh persoalan pengangguran yang kronis, di mana kapasitas pasar kerja masih belum sanggup mengakomodasi lonjakan jumlah angkatan kerja di usia produktif.

Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan kerja ini menyulitkan otoritas dalam menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang hingga kini tetap menjadi agenda prioritas dalam strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Walaupun indikator ekonomi menunjukkan tren positif,

realitasnya ekspansi bisnis yang terjadi belum tentu diikuti oleh perekrutan tenaga kerja yang memadai bagi jutaan pencari kerja baru setiap tahunnya. Fenomena ini sangat terasa di wilayah pusat industri seperti Pulau Jawa, di mana kemacetan pada sektor manufaktur sering kali mengakibatkan tingginya jumlah individu usia produktif yang tidak terserap oleh dunia usaha.

Padahal, hasil penilaian World Bank peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) telah memperkuat status Indonesia dalam kancah manufaktur internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, keberhasilan Indonesia menembus peringkat 13 besar dunia dalam daftar negara manufaktur berdasarkan nilai tambah pada tahun 2023 menunjukkan potensi besar industri nasional (Fadilah, 2025). Pencapaian ini seharusnya dapat menjadi momentum untuk merevitalisasi sektor pengolahan agar kembali mampu menjadi solusi bagi permasalahan pengangguran di masa depan.

Negara	Nilai Tambah Manufaktur, 2023	Peringkat Global
Cina	4658,79	1
Amerika Serikat	2840,45	2
Jepang	867,11	3

Jerman	830,9	4
India	473,68	5
Korea Selatan	416,39	6
Meksiko	363,48	7
Italia	351,75	8
Perancis	297	9
Brazil	290,39	10
Inggris	279,15	11
Rusia	264,04	12
Indonesia	255,96	13
Turki	218,58	14
Arab Saudi	193,65	15

Tabel 1. 1 Nilai Tambah Manufaktur Dunia (USD Miliar), 2023

Sumber : World Bank (Diolah)

Hal ini menempatkan manufaktur sebagai sektor terbesar di Indonesia. Pemilihan Pulau Jawa sebagai subjek penelitian didasarkan pada fakta bahwa industri manufaktur sebagai komponen sektor padat karya yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kawasan industri besar di daerah Bekasi-Karawang dan area industri baru yang berkembang di Jawa Tengah menjadi daya tarik investasi yang sangat besar. Efek aglomerasi ini memungkinkan perusahaan untuk

menekan biaya logistik dan mendapatkan akses mudah ke pelabuhan utama, menjadikannya lokasi ideal bagi korporasi yang berorientasi pada peningkatan nilai *output* dan ekspansi pasar internasional.

Kuncoro (2004) dalam (R. D. P. Sari & Oktora, 2021) menjelaskan bahwa distribusi pembangunan industri di Indonesia memperlihatkan adanya ketimpangan geografis yang tajam. Pusat kegiatan manufaktur nasional masih terkumpul di wilayah Pulau Jawa. Maksudnya, akumulasi industri ini cenderung terjadi hanya pada area Barat (wilayah Jabodetabek) dan area Timur (Provinsi Jawa Timur). Realitas tersebut menjadi bukti nyata berlakunya pola dua kutub atau *bipolar pattern* dalam industri di Jawa, yang dipicu oleh keberagaman karakteristik masing-masing wilayah. Setiap provinsi memiliki keunikan tersendiri dalam hal spesifikasi industri, ketersediaan bahan baku, hingga kerangka ekonomi makronya. Fenomena pemusatan industri ini memperjelas bahwa ketenagakerjaan di wilayah ini sangat bergantung pada performa industri di titik-titik aglomerasi tersebut.

Namun, keterpusatan pada pusat-pusat manufaktur ini menimbulkan risiko kerentanan secara struktural. Hal ini dikarenakan stabilitas angka pengangguran sangat sensitif terhadap gejolak yang mempengaruhi performa perdagangan luar negeri maupun pembiayaan bagi perusahaan di wilayah urban. Karena setiap hambatan pada ekspor atau kendala dalam penyaluran kredit

perbankan akan memberikan dampak instan terhadap fluktuasi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa per Agustus 2023, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di berbagai wilayah Pulau Jawa memperlihatkan disparitas yang cukup signifikan antarprovinsi yang memperkuat pernyataan sebelumnya.

38 Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Menurut Provinsi (Persen)
	2023
ACEH	5,89
SUMATERA UTARA	5,56
SUMATERA BARAT	5,92
RIAU	4,24
JAMBI	4,51
SUMATERA SELATAN	4,32
BENGKULU	3,31
LAMPUNG	4,20
KEP. BANGKA BELITUNG	4,22
KEP. RIAU	7,20
DKI JAKARTA	7,05
JAWA BARAT	7,66
JAWA TENGAH	5,18
DI YOGYAKARTA	3,63



JAWA TIMUR	4,60
BANTEN	7,74
BALI	3,21
NUSA TENGGARA BARAT	3,26
NUSA TENGGARA TIMUR	3,12
KALIMANTAN BARAT	4,78
KALIMANTAN TENGAH	3,97
KALIMANTAN SELATAN	4,13
KALIMANTAN TIMUR	5,84
KALIMANTAN UTARA	4,05
SULAWESI UTARA	6,14
SULAWESI TENGAH	3,22
SULAWESI SELATAN	4,79
SULAWESI TENGGARA	3,40
GORONTALO	3,06
SULAWESI BARAT	2,65
MALUKU	6,19
MALUKU UTARA	4,45
PAPUA BARAT	5,45
PAPUA BARAT DAYA	-
PAPUA	3,08
PAPUA SELATAN	-
PAPUA TENGAH	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-

INDONESIA	5,38
-----------	------

*Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
(Persen), 2023*

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, TPT di DKI Jakarta berada pada angka 7,05%, diikuti Jawa Barat sebesar 7,66%, dan Banten yang mencapai 7,74%. Sementara itu, Jawa Tengah mencatat angka 5,18%, DI Yogyakarta sebesar 3,63%, serta Jawa Timur di angka 4,60%. Data ini mengonfirmasi bahwa provinsi-provinsi yang menjadi pusat kegiatan industri, seperti Jawa Barat dan Banten, sering kali memiliki persentase pengangguran yang melampaui rata-rata nasional. Situasi tersebut melahirkan sebuah kontradiksi yang menyelutuh, yang mana permasalahan tersebut terjadi di Pulau Jawa karena semakin marak dengan adanya peningkatan pada industri padat modal (Sanjaya & Setyanto, 2025).

Dalam ekosistem manufaktur tersebut, industri yang bersifat padat karya seperti manufaktur tekstil, garmen, dan sepatu memiliki fungsi vital sebagai wadah utama bagi pekerja dengan keahlian terbatas maupun menengah. Bidang-bidang usaha ini memberikan kepastian kerja formal bagi jutaan penduduk yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah, berbeda dengan industri padat modal yang mensyaratkan spesialisasi teknis dan jenjang pendidikan tinggi. Mengingat kapasitasnya yang mampu mengalihkan tenaga

kerja dari pedesaan ke sektor industri perkotaan dalam skala besar, penguatan pada sektor padat karya menjadi instrumen yang sangat mendasar untuk mempertahankan keseimbangan sosial dan stabilitas ekonomi nasional (Mutiara & Bendesa, 2016).

Fluktuasi ekspor menjadi faktor penentu krusial bagi resiliensi sektor padat karya di Pulau Jawa, mengingat mayoritas hasil produksinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar mancanegara. Level pesanan global pada komoditas garmen, tekstil, serta alas kaki berperan sebagai stimulan bagi operasional manufaktur di tingkat basis produksi. Mengacu pada Hukum Okun, angka pengangguran memiliki korelasi terbalik dengan laju ekspansi ekonomi nasional, di mana peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan GDP riil. Oleh sebab itu, akselerasi ekonomi menjadi syarat mutlak untuk menekan populasi pengangguran, dan penguatan kinerja ekspor yang mampu menjadi solusi dalam memperluas penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, performa perdagangan luar negeri berfungsi sebagai indikator keunggulan kompetitif industri sebuah negara yang pada akhirnya akan menghasilkan perekonomian yang baik (Pramesti, 2023). Kapasitas industri dalam menghasilkan produk sesuai ekspektasi pasar dunia tercermin dari nilai ekspor manufakturnya, yang fluktuasinya dipengaruhi oleh dinamika permintaan global, stabilitas logistik bahan baku, efisiensi

operasional, serta regulasi perdagangan (Tiawinata et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas pasar ekspor sangat penting untuk menjaga daya serap tenaga kerja, karena perubahan dalam perdagangan internasional secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di daerah pusat industri. Secara teoretis, pertumbuhan nilai output di sektor manufaktur akan memicu peningkatan penyerapan sumber daya manusia melalui prinsip *derived demand for labor* atau permintaan turunan. Sebagaimana dijelaskan dalam studi (Ramadani & Iskandar, 2024) kebutuhan akan pekerja merupakan konsekuensi langsung dari adanya permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Artinya, semakin masif output nasional yang diciptakan, maka urgensi untuk merekrut tenaga kerja tambahan akan semakin tinggi.

Selaras dengan itu, Simanjuntak (2001) dalam (Soca & Woyanti, 2021) memaparkan bahwa tinggi rendahnya tenaga kerja yang dikelola oleh sebuah korporasi sangat bergantung pada volume produksi yang dihasilkan. Besarnya volume produksi tersebut pada akhirnya ditentukan oleh tingkat konsumsi masyarakat. Ketika permintaan konsumen meroket, maka produsen akan mengekspansi kapasitas produksinya, yang secara mekanis meningkatkan kebutuhan akan keterlibatan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar.

Di sisi lain, menurut Sudarsono (1998) dalam (Kholiani &

Yudha Senopati, 2024) menekankan bahwa transformasi sektor industri membutuhkan dukungan kapital yang kuat agar dapat mencapai target pembangunan yang diharapkan. Injeksi modal melalui aktivitas investasi akan menstimulasi perekonomian melalui kanal permintaan agregat, yang selanjutnya memacu unit-unit produksi dan memperluas peluang kerja. Dalam konteks ini, sokongan pembiayaan melalui kredit korporasi, baik berupa Kredit Investasi (KI) maupun Kredit Modal Kerja (KMK), menjadi insentif yang sangat vital bagi keberlangsungan industri padat karya berskala besar di Pulau Jawa. Fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan berperan sebagai penyedia likuiditas bagi perusahaan untuk menjaga kesinambungan operasional sekaligus mendanai ekspansi bisnis mereka.

Selain itu, siklus yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka terdiri dari ketiga faktor ini, yaitu nilai output, ekspor, dan kredit korporasi. Secara logis, peningkatan target ekspor akan memaksa perusahaan untuk meningkatkan nilai output produksinya secara signifikan. Proses peningkatan kapasitas produksi ini biasanya membutuhkan dukungan modal kerja yang besar, yang biasanya diberikan oleh kredit korporasi untuk membiayai bisnis dalam skala besar. Selama tiga belas tahun terakhir, kekuatan daya serap tenaga kerja di Pulau Jawa dipengaruhi oleh korelasi antara kredit korporasi, nilai output, dan ekspor. Melalui pendekatan path

analysis, keterkaitan ini akan diuji untuk menentukan jalur mana yang paling efektif dalam mengentaskan masalah pengangguran selama tiga belas tahun terakhir.

Signifikansi penelitian ini semakin menguat pasca terjadinya guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2022, yang menjadi fase krusial bagi industri manufaktur di Jawa. Krisis kesehatan global tersebut telah melumpuhkan rantai pasok dunia dan membatasi mobilitas, yang berujung pada kemerosotan tajam permintaan ekspor serta penghentian aktivitas pabrik secara tiba-tiba. Kondisi pasar yang fluktuatif, ditambah dengan pertumbuhan angkatan kerja yang menurun dan persaingan yang semakin ketat, memicu kekhawatiran besar akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. PHK sendiri merupakan terminologi bagi berhentinya ikatan kerja secara permanen antara pemberi kerja dan karyawan, yang ditandai dengan perpindahan atau keluarnya tenaga kerja dari perusahaan yang memberikan upah karena berbagai faktor pendukung lainnya (Cahyadi & Herning Sitabuana, 2022).

Bukan hanya itu, Persoalan utama dalam kajian ini juga dipicu oleh pergeseran tren di Pulau Jawa yang lebih mengedepankan sektor padat modal ketimbang padat karya. Padahal, merujuk pada pemikiran Santoso (2010) dalam (Santoso et al., 2021) keberlanjutan operasional sebuah perusahaan sangat

bertumpu pada pemanfaatan sumber daya manusia dalam skala masif, di mana sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja ini memiliki peran vital dalam menstimulasi kemajuan ekonomi di tingkat regional. Dominasi penggunaan tenaga manusia bukan sekadar urusan teknis produksi, melainkan pilar penyangga stabilitas ekonomi yang krusial bagi daerah-daerah di Pulau Jawa..

Di samping dampak krisis kesehatan global dan dinamika sektor padat karya, kurun waktu 2011 hingga 2023 juga ditandai oleh arus perpindahan lokasi pabrik yang sangat signifikan di internal wilayah Jawa. Lonjakan standar upah minimum di zona aglomerasi bagian barat, seperti area Tangerang, Bekasi, dan Karawang, memaksa entitas bisnis manufaktur untuk bermigrasi ke daerah dengan biaya tenaga kerja yang lebih terjangkau, terutama wilayah Jawa Tengah. Fenomena ini selaras dengan prinsip dalam New Trade Theory serta New Geographic Economy Theory yang menyatakan bahwa beban upah yang rendah merupakan determinan utama bagi produsen dalam menentukan letak operasionalnya. Temuan ini memperkuat hipotesis teori lokasi yang menyatakan bahwa pelaku industri cenderung memilih domisili usaha dengan tingkat upah kompetitif guna meminimalisir biaya produksi secara keseluruhan (Novia, 2023).

Dalam sebuah artikel (Saptamaji, 2024) menjelaskan bahwa

secara umum ada beberapa faktor yang menarik para pengusaha untuk melakukan relokasi industri dan investasi ke Jawa tengah yaitu:

1. Ketersediaan ruang yang sangat luas, di mana provinsi ini mencakup hampir sepertiga luas daratan Jawa dengan potensi perluasan kawasan industri yang masih terbuka lebar.
2. Keunggulan infrastruktur yang mumpuni, mulai dari keberadaan pelabuhan laut internasional seperti Tanjung Emas dan Cilacap, fasilitas bandara di Semarang dan Solo, hingga konektivitas jalan tol Trans Jawa yang mempermudah logistik.
3. Aspek sumber daya manusia yang melimpah dengan puluhan juta penduduk usia produktif, didukung institusi pendidikan vokasi, serta tingkat upah yang jauh lebih ekonomis dibanding pusat industri lama di Jawa Barat atau Banten.
4. Tumbuhnya zona ekonomi baru yang modern seperti Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai destinasi investasi terbesar, serta kawasan pendukung lainnya di Wijayakusuma, Candi, dan Sragen yang telah berpengalaman melayani berbagai sektor mulai dari tekstil hingga otomotif.

Selanjutnya dalam penelitian (Neama & Aya, 2025), Hasil studi ini menunjukkan bahwa ekspor komoditas (khususnya minyak) memang berhasil meningkatkan pendapatan negara atau PDB secara signifikan. Namun, pertumbuhan ini tidak disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang besar karena sektor minyak bersifat padat modal dan minim penggunaan personel. Hal ini menegaskan bahwa nilai ekspor yang tinggi tidak akan efektif mengatasi pengangguran selama struktur ekonomi belum beralih ke sektor manufaktur yang lebih banyak membutuhkan tenaga manusia.

Kemudian penelitian yang dilakukan (ElFayoumi, 2018), mengungkapkan fenomena pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja (*jobless growth*). Ditemukan bahwa kemudahan akses kredit korporasi memang mendorong kenaikan output nasional, namun di sisi lain justru menekan jumlah pekerja. Hal ini terjadi karena perusahaan cenderung menggunakan pinjaman modal untuk investasi teknologi atau otomatisasi mesin guna menggantikan peran manusia, sehingga akses modal hanya akan efektif menekan pengangguran jika diarahkan pada sektor-sektor tertentu yang produktif.

Hasil analisis yang dilakukan (Byaro et al., 2024) di 66 negara berpendapatan rendah menunjukkan bahwa akses kredit bank dan aktivitas perdagangan (ekspor) ternyata tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan maupun pengangguran secara inklusif.

Meskipun variabel-variabel tersebut berhasil menaikkan nilai output ekonomi, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat bawah. Dengan kata lain, peningkatan output yang didanai oleh kredit korporasi tidak secara otomatis memperbaiki kesejahteraan sosial atau menciptakan lapangan kerja yang luas di negara-negara tersebut.

Lebih jelas lagi, dalam penelitian (Susanti, 2020) ini menunjukkan bahwa ekspor memiliki dampak yang berbeda tergantung jangka waktunya. Dalam jangka panjang, peningkatan ekspor terbukti efektif menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Namun, dalam jangka pendek, perubahan ekspor tidak memberikan pengaruh nyata terhadap statistik pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi dari ekspor membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari enam bulan, untuk benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Kemudian, studi (F. R. G. Putri & Suhartini, 2024) menemukan bahwa kenaikan nilai output di sektor industri justru berdampak pada meningkatnya pengangguran di kalangan usia muda yang terpelajar. Fenomena ini terjadi karena sektor industri di Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan modal besar (*capital intensive*) yang membutuhkan sedikit tenaga kerja. Akibatnya, meskipun hasil produksi industri terus meningkat, hal

tersebut belum mampu menjadi solusi untuk menyerap angkatan kerja muda yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Terakhir, hasil penelitian (Purno et al., 2023) mengungkapkan bahwa penyaluran kredit perbankan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas industri manufaktur. Karena sektor industri tidak mengalami penguatan melalui dukungan modal tersebut, perannya dalam menciptakan lapangan kerja baru pun menjadi sangat terbatas. Dengan kata lain, kucuran dana dari bank belum berhasil menjadi alat yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran karena belum mampu memicu pertumbuhan yang nyata pada sektor-sektor produktif.

Padahal dalam beberapa artikel penelitian mengenai dinamika pasar tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan akses finansial memiliki peran krusial melalui mekanisme yang berbeda. Berdasarkan (Laksono et al., 2024), ekspansi ekspor manufaktur Indonesia ke Tiongkok terbukti mendorong formalisasi pekerjaan yang bersifat progresif bagi kelompok pendapatan menengah ke bawah, meskipun tidak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan secara umum. Di sisi lain, (Dixon et al., 2017) yang menjelaskan hubungan output terhadap pengangguran, artikel tersebut mengonfirmasi berlakunya Hukum Okun di 20 negara OECD, di mana peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) secara efektif menurunkan pengangguran, terutama pada

kelompok kaum muda yang lebih sensitif terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan pekerja senior. Melengkapi instrumen pemberdayaan ekonomi tersebut, (Khudoykulov et al., 2026) menemukan bahwa akses terhadap kredit merupakan saluran inklusi keuangan yang paling signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Asia dengan memfasilitasi investasi produktif dan akumulasi modal manusia.

Maka dari itu, kebutuhan untuk memeriksa hubungan antar variabel independen dalam model struktural yang stabil adalah dasar dari penerapan metode Path Analysis (Analisis Jalur) dalam penelitian ini. Path Analysis berbeda dengan regresi linear sederhana karena memungkinkan peneliti untuk mengukur pengaruh langsung ekspor, nilai output, dan kredit korporasi terhadap pengangguran serta menemukan korelasi antar variabel eksogen. Ini sangat penting karena, dalam dunia ekonomi nyata, peningkatan ekspor pasti akan bersinggungan dengan peningkatan kebutuhan kredit dan kapasitas output. Dengan menggunakan model ini, kekuatan pengaruh dari setiap jalur dapat dihitung secara akurat. Ini akan memungkinkan untuk menentukan variabel mana yang memiliki kontribusi terbesar dalam menekan tingkat pengangguran di Pulau Jawa.

Rentang waktu penelitian dari 2011 hingga 2023 dianggap sangat representatif karena mencakup fase-fase yang berbeda dari siklus ekonomi Indonesia yang sedang berkembang. Saat ini adalah masa transisi setelah krisis keuangan global, era keemasan

komoditas, dan fase pemulihan hebat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan pemulihannya. Penelitian ini mampu menunjukkan tren jangka panjang dalam penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya dengan durasi pengamatan selama 13 tahun. Data historis ini sangat penting untuk menentukan apakah instrumen keuangan dan kebijakan makroekonomi yang digunakan selama sepuluh tahun terakhir telah berhasil merespon perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah pusat industri.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi berbasis data kepada para pengambil kebijakan, khususnya otoritas moneter dan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan strategi untuk meningkatkan sektor padat karya. Strategi seperti ini dapat mencakup pengoptimalan penyaluran kredit yang lebih tepat sasaran dan kebijakan insentif ekspor yang dapat secara signifikan meningkatkan output. Dengan mengetahui faktor mana yang paling efektif menurunkan pengangguran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan, sekaligus memitigasi risiko pengangguran struktural di masa depan.

Pernyataan novelty dari penelitian ini terletak pada fakta bahwa menggabungkan tiga variabel independen secara bersamaan, nilai output, ekspor, dan kredit korporasi dalam konteks sektor padat

karya khusus di Pulau Jawa tanpa mempertimbangkan variabel intervening. Studi sebelumnya seringkali membedah variabel tersebut secara terpisah atau menggunakan model yang terlalu kompleks dengan variabel antara. Hasil penelitian ini memiliki nilai relevansi yang tinggi terhadap dinamika ketenagakerjaan riil di pusat ekonomi Indonesia karena penekanan pada Pulau Jawa sebagai wilayah aglomerasi industri terbesar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif Ekspor (X1) melalui Nilai Output (X2) dan Nilai Output (X2 melalui Ekspor (X1) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif Nilai Output (X2) melalui Kredit Korporasi (X3) dan Kredit Korporasi (X3) melalui Nilai Output (X2) terhadap tingkat Pengangguran Terbuka (Y)?
3. Apakah terdapat pengaruh negatif Kredit Korporasi (X3) melalui Ekspor (X1) dan Ekspor (X1) melalui Kredit Korporasi (X3) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)?
4. Apakah Ekspor (X1) mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Nilai Output (X2) dan Kredit Korporasi (X3)?

5. Apakah Nilai Output (X_2) mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) baik secara langsung maupun tidak langsung Kredit Korporasi (X_3) dan Ekspor (X_1)?
6. Apakah Kredit Korporasi (X_3) mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Ekspor (X_1) dan Nilai Output (X_2)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Menganalisis hubungan antara Ekspor (X_1) dan Nilai Output (X_2) pada sektor padat karya yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa.
2. Menganalisis hubungan antara Ekspor (X_1) dan Kredit Korporasi (X_3) pada sektor padat karya yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa.
3. Menganalisis hubungan antara Nilai Output (X_2) dan Kredit Korporasi (X_3) pada sektor padat karya yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa.
4. Menganalisis dan menguji Ekspor (X_1) pada sektor padat karya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), untuk melihat permintaan luar negeri mampu menciptakan lapangan kerja domestik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dukungan Nilai Output (X_2) dan Kredit Korporasi (X_3).

5. Menganalisis dan menguji Nilai Output (X2) pada sektor padat karya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Pulau Jawa periode 2011-2023, untuk melihat apakah peningkatan produksi fisik sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dukungan Kredit Korporasi (X3) dan Ekspor (X1).
6. Menganalisis dan menguji Kredit Korporasi (X3) pada sektor padat karya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Pulau Jawa periode 2011-2023, guna melihat apakah akses permodalan benar-benar digunakan untuk ekspansi yang menyerap tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dukungan Ekspor (X1) dan Nilai Output (X2).

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ekonomi ketenagakerjaan, khususnya mengenai hubungan antara sektor moneter (kredit) dan sektor riil (ekspor & output) terhadap pasar tenaga kerja dan menjadi referensi tambahan dalam penerapan model analisis jalur untuk mengkaji fenomena ekonomi tanpa variabel antara, serta memperkaya literatur mengenai efektivitas

sektor padat karya di Pulau Jawa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah & Pusat

Hasil penelitian ini dapat menjadi basis data bagi pemerintah di Pulau Jawa untuk menentukan apakah strategi penurunan pengangguran lebih efektif melalui insentif ekspor atau melalui peningkatan kapasitas produksi domestik, dan memberikan masukan mengenai efektivitas penyaluran kredit korporasi. Jika ternyata kredit korporasi berpengaruh besar terhadap penurunan pengangguran, pemerintah dapat mendorong kebijakan suku bunga yang lebih kompetitif bagi industri padat karya.

b. Bagi Sektor Perbankan dan Institusi Keuangan

Hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran bagi perusahaan padat karya yang memiliki potensi serapan tenaga kerja tinggi.

c. Bagi Pelaku Industri Padat Karya

Memberikan wawasan kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya keseimbangan antara mengejar target ekspor, optimalisasi nilai output dan akses kredit sebagai upaya menjaga keberlangsungan tenaga kerja di perusahaan mereka.

d. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan pengolahan data panel dan analisis jalur menggunakan perangkat lunak statistik serta memperdalam pemahaman penulis mengenai keterkaitan antara sektor keuangan, perdagangan internasional, dan isu ketenagakerjaan di Indonesia.

e. Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian serupa, serta memperluas wawasan dan pengetahuan mereka, khususnya terkait pengaruh ekspor, nilai output dan kredit korporasi dengan menggunakan analisis jalur pada sektor padat karya terhadap pengangguran di pulau jawa, mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata mengenai pentingnya sektor padat karya bagi perekonomian nasional, sehingga mahasiswa dapat lebih kritis dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan.